

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Tinjauan Umum Partai Politik**

##### **1. Pengertian Partai Politik**

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *politie* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Orang pertama yang memperkenalkan kata politik adalah Aristoteles melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik” Ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam arti luas setiap orang adalah politisi.

Dalam hal ini Aristoteles berpendapat bahwa “satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara.” Karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya. Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa “partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.” (Miriam Budiardjo, 2008, hlm.160-161).

## **2. Fungsi Partai**

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang fungsi partai politik yaitu sebagai :

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik (Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007, hlm. 103-104) sebagai berikut.

### **a. Komunikasi Politik**

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*).

Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukkan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada

pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok (Miriam Budiardjo, 2008. Hlm. 406).

#### b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya (M. Rush dalam A. Rahman H.I., 2007: Hlm.103-104). Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya.

Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*). A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai

juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota- anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama. (M. Rush dalam A. Rahman H.I, 2007, Hlm.103-104).

#### c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004, hlm. 117). Sedangkan menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin, 2007, hlm.113).

#### d. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart (A. Rahman H.I., 2007, Hlm. 103-104) perbedaan- perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah *elite* politik.

## **B. Partisipasi Politik**

### **1. Pengertian Partisipasi**

Menurut Made Pidarta dalam (Siti Irene Astuti D., 2009, hlm. 31-32), partisipasi adalah Pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala

kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Dalam pandangan (Almond dan Powell, JR., 1978, hal. 4)

*“political participation is not only limited to taking part or role in the context of political activities, but political participation is always preceded by an articulation of interests in which an individual is able to control political resources, as well as a political party leader.”*

Partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau berperan dalam konteks kegiatan politik, akan tetapi partisipasi politik selalu di dahului dengan artikulasi kepentingan dimana seseorang mampu menguasai sumberdaya politik, serta seorang pemimpin politik. (Yusa Djuyandi dan Ari GH. 2018, hlm. 195-207)

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

(Menurut Deepa Naryan, 1995) partisipasi juga memiliki pengertian:

*“a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”* (“suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.”)

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009, hlm. 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001, hlm. 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2009, hlm. 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007, hlm. 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi dibagi menjadi 6 (enam) pengertian (Mikkelsen, 1999, hlm. 64) yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau

sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh (Conyers 1991, hlm.154-155) sebagai berikut:

“pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.”

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

#### a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009, hlm. 34-35) menegaskan bahwa “partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat”. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- 1) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain

untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

- 2) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.
- 3) Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- 4) Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental
- 5) Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu menurut Seta Basri tentang pengertian partisipasi politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan di mobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Lewat penelitian mereka, Huntington and Nelson memberikan suatu catatan: Partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*). Bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya.

Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya mengenai *E-Activism: New Media and Political Participation in Europe*. Warganegara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

## **2. Landasan Partisipasi Politik**

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990, hlm: 9-10). Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

- a. Kelas, individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- b. kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- c. Lingkungan, individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
- d. Partai, individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
- e. [golongan atau faksi](#), individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

## **3. Model Partisipasi Politik**

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar,

*Conventional* dan *Unconventional*. *Conventional* adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (*environmentalist*), gerakan perempuan gelombang 2 (*feminist*), protes mahasiswa (*students protest*), dan teror. ( Almond. 1993, hlm. 46-47).

## 2. Bentuk Partisipasi Politik

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- b. *Lobby*, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
- c. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- d. *Contacting*, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
- e. Tindakan Kekerasan (*violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau

ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson belumlah relatif lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu.

Thomas M. Magstadt menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi:

a. Opini Publik.

Opini publik yang kuat dapat saja mendorong para legislator ataupun eksekutif politik mengubah pandangan mereka atas suatu isu. Opini publik ini mengejawantah dalam bentuk lain partisipasi politik selanjutnya, berupa polling, pemilihan umum, dan demokrasi langsung.

a. *Polling*.

*Polling* adalah upaya pengukuran opini publik dan juga memengaruhinya. Melalui *polling* inilah, partisipasi politik (menurut Magstadt) warganegara menemui manifestasinya. Di dalam *polling*, terdapat aneka konsep yang menjadi bagian di dalam dirinya yaitu: *straw polls*, *random sampling*, *stratified sampling*, *exit polling*, dan *tracking polls*.

b. *Straw polls*

*Straw polls* adalah survey yang tidak ilmiah karena bersifat sederhana, murah, dan amat terbuka untuk penyalahgunaan dan manipulasi. *Straw polls* dianggap tidak ilmiah karena tidak mempertimbangkan representasi populasi yang menjadi responden *polling*. Penentuan responden bersifat serampangan, dan terkadang hanya menggunakan sampel yang hanya merupakan bagian tertentu dari populasi.

c. *Random sampling*

*Random sampling* adalah metode *polling* yang melibatkan *canvassing* atas populasi secara acak. Lawan dari *random sampling* adalah *stratified sampling*. Dalam teknik ini, disarankan jumlah minimal untuk suatu *polling* adalah 1500

orang apabila populasi yang diambil pendapatnya adalah besar. Pengambilan sampel acak harus bersifat lintas-segmen seperti usia, ras, agama, orientasi politik, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang signifikan di suatu masyarakat. Lawan dari *random sampling* adalah *stratified sampling*. Metode ini adalah cara menentukan responden polling, yang diadakan akibat munculnya keterbatasan untuk melakukan *random sampling*. Dalam *stratified sampling*, pihak yang menyelenggarakan *polling* memilih populasi yang cukup kecil tetapi memiliki karakteristik khusus.

d. *Exit polling*

*Exit polling* adalah polling yang memungkinkan jaringan televisi memprediksi pemenang suatu pemilihan umum segera setelah pemungutan suara usai. Teknik yang dilakukan adalah menyurvei pemberi suara di tps-tps tertentu.

e. *Tracking polls*

*Tracking polls* adalah polling yang dilakukan atas responden yang sama dalam suatu periode kampanye. Tujuannya mengidentifikasi peralihan sentimen pemilih atas suatu calon, partai, ataupun isu. Tujuan dari polling ini adalah memperbaiki kinerja kampanye calon, kampanye parpol, bahkan kinerja pemerintah.

f. Pemilihan umum (Pemilu)

Pemilihan umum erat hubungannya dengan *polling*. Pemilu hakikatnya adalah *polling* "paling lengkap" karena menggunakan seluruh warga negara benar-benar punya hak pilih (tidak seperti polling yang menggunakan sampel).

g. [Demokrasi langsung](#).

Demokrasi langsung adalah suatu situasi di mana pemilih (*konstituen*) sekaligus menjadi legislator. Demokrasi langsung terdiri atas *plebisit* dan *referendum*. *Plebisit* adalah pengambilan suara oleh seluruh komunitas atas kebijakan publik dalam masalah tertentu. Misalnya, dalam kasus kenaikan harga BBM ketika parlemen mengalami deadlock dengan eksekutif, diambilah plebisit apakah naik atau tidak. *Referendum* adalah pemberian suara dengan mana warganegara dapat

memutuskan suatu undang-undang. Misalnya, apakah undang-undang otonomi daerah perlu direvisi ataukah tidak, dan parlemen mengalami *deadlock*, dilakukanlah referendum.

## **C. Lanjut Usia**

### **1. Pengertian Lanjut Usia**

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas (Pasal 1, ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Dimulainya batas usia lanjut tampak bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Menurut Titus, ketua umum Lembaga Lanjut Usia Indonesia, Lanjut usia(lansia) adalah warga yang berusia di atas 60 tahun.

### **2. Pengertian Lansia Menurut *World Health Organisation* (WHO)**

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *Aging Process* atau proses penuaan. (Stefanus Mendes Kiik, Junaiti Sahar, dan Henny Permatasari, 2018, hal : 109-116)

Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapantahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada *activity of daily living* (Fatmah, 2010).

### **3. Batasan-batasan usia lanjut**

Batasan umur pada usia lanjut dari waktu ke waktu berbeda. Menurut *World Health Organization (WHO)* dalam Stefanus Mendes Kiik, Junaiti Sahar, dan (Henny Permatasari 2018, hal 109-116) lansia meliputi :

- a) Usia pertengahan (*middle age*) antara usia 45 sampai 59 tahun.
- b) Lanjut usia (*elderly*) antara usia 60 sampai 74 tahun.
- c) Lanjut usia tua (*old*) antara usia 75 sampai 90 tahun.
- d) Usia sangat tua (*very old*) diatas usia 90 tahun.

Berbeda dengan WHO, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2006) pengelompokkan lansia menjadi :

- a) Virilitas (*prasenium*) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun).
- b) Usia lanjut dini (*senescen*) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun).
- c) Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif (usia >65 tahun).

Menurut (Prof. Dr. Koesmanto Setyonegoro), lanjut usia dikelompokkan menjadi usia dewasa muda (*elderly adulthood*),

1. Usia 18 atau 29 – 25 tahun, usia dewasa penuh (*middle years*) atau maturitas.
2. Usia 25 – 60 tahun atau 65 tahun, lanjut usia (*geriatric age*).
3. Usia Lebih dari 65 tahun atau 70 tahun yang dibagi lagi dengan 70 – 75 tahun (*young old*)
4. Usia 75 – 80 tahun (*old*)
5. Usia Lebih dari 80 (*very old*)

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1965 Pasal 1 seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang jompo atau lanjut usia setelah bersangkutan mencapai umur 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain.

Selain batasan-batasan yang dimiliki usia lanjut, ada juga perubahan-perubahan yang di alami usia lanjut yaitu:

- a) Sistem Indra Sistem pendengaran, Prebiakusis (gangguan pada pendengaran) oleh karena hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas 60 tahun.
- b) Sistem Intergumen, Pada lansia kulit mengalami atrofi, kendur, tidak elastis kering dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atrofi glandula sebacea dan glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal dengan liver spot.
- c) Sistem Muskuloskeletal Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia antara lain sebagai berikut, Jaringan penghubung (kolagen dan elastin). Kolagen sebagai pendukung utama kulit, tendon, tulang, kartilago dan jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi bentangan yang tidak teratur.
- d) Kartilago, jaringan kartilago pada persendian lunak dan mengalami granulasi dan akhirnya permukaan sendi menjadi rata, kemudian kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang dan degenerasi yang terjadi cenderung kearah progresif, konsekuensinya kartilago pada persendiaan menjadi rentan terhadap gesekan.
- e) Tulang, berkurangnya kepadatan tualng setelah di obserfasi adalah bagian dari penuaan fisiologi akan mengakibatkan osteoporosis lebih lanjut mengakibatkan nyeri, deformitas dan fraktur.
- f) Otot, perubahan struktur otot pada penuaan sangat bervariasi, penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, peningkatan jaringan penghubung dan jaringan lemak pada otot mengakibatkan efek negatif.
- g) Sendi, pada lansia, jaringan ikat sekitar sendi seperti tendon, ligament dan fascia mengalami penuaan elastisitas.
- h) Perubahan Kognitif
  - i. *Memory* (Daya ingat, Ingatan) ;
  - ii. *IQ (Intellegent Quocient)* ;

- iii. Kemampuan Belajar (*Learning*) ;
- iv. Kemampuan Pemahaman (*Comprehension*) ;
- v. Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) ;
- vi. Pengambilan Keputusan (*Decission Making*) ;
- vii. Kebijaksanaan (*Wisdom*);
- viii. Kinerja (*Performance*);
- ix. Motivasi .

Perubahan fisik dan psikologis yang di alami lansia sangat menentukan sampai taraf tertentu, apakah lansia akan melakukan penyesuaian yang baik atau buruk. Menurut Harlock, ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk daripada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Karena itu, usia lanjut lebih di takuti daripada usia madya, khususnya dalam kebudayaan Amerika (Harlock, 1996, hal: 308).

Perasaan tidak berguna dan tidak diinginkan membuat lansia mengembangkan perasaan rendah diri dan marah. Perasaan ini tentu saja tidak membantu dalam penyesuaian social dan pribadi yang baik.

Selain itu *Emotional intelligence* dapat dianggap sebagai factor yang berkontribusi pada perubahan psikologi lansia, meskipun banyak yang memandang periode lanjut usia sebagai waktu yang tidak memerlukan perjuangan hebat dan penuh kekacauan. Beberapa peneliti justru menilai bahwa periode lansia dari perspektif yang lebih negative dimana dirasakan bahwa sebaian lansia kurang mampu menangani periode perkembangan ini dengan baik.

#### **4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Lanjut Usia**

Menjadi masyarakat lansia bukanlah menjadi suatu beban yang harus di tanggung, baik dari segi pekerjaan, kesehatan ataupun yang meliputi aspek yang lain, banyak yang bisa di lakukan oleh masyarakat lansia, terutama dalam aspek partisipasi, berbagai bentuk partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat lansia adalah :

#### a. Partisipasi Lansia Dalam Kelembagaan Politik Desa

Sebagai pengambilan keputusan-keputusan politik di lingkup desa, karena memiliki usia tua di desa menempatkan seseorang tersebut pada posisi yang di hormati serta menggolongkan orang yang dianggap lebih tua itu kepada kaum sesepuh yang patut untuk banyak didengarkan nasihat-nasihat dari mereka serta pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum yang masih muda. Meski terhormat tidak semua Lansia memiliki pengaruh dalam kelembagaan politik desa. Kondisi sosial ekonomi Lansia yang menjadi determinan utama partisipasi mereka dalam kelembagaan yang menjalankan fungsi penyaluran aspirasi, pengambilan keputusan serta pendistribusian kekuasaan pada masyarakat desa (Suyani , 2007, Hal. 148-149).

#### 6. Partisipasi Lansia Dalam Pelayanan Kesehatan Posyandu Lansia

Partisipasi lanjut usia dalam Posyandu Lansia yaitu berupa partisipasi tenaga, dana dan material. Pada partisipasi tenaga adalah keikutsertaan dalam kehadiran di posyandu lansia, melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan posyandu lansia seperti senam, pemeriksaan kesehatan kesehatan, serta rekreasi, sedangkan partisipasi dana yaitu keikutsertaan dalam memberikan sumbangan secara sukarela di setiap pertemuan, dan partisipasi material yaitu keikutsertaan dalam bentuk sumbangan yang dipergunakan untuk umum seperti menjenguk orang sakit. (Wulandari, 2017, hal. 105).

#### 7. Partisipasi lansia dalam pemilihan umum

Memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih sesuai dengan keinginannya, serta mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah terkhususnya bagi para lansia agar dapat memahami dan juga mmberikan edukasi dalam proses pemiihan umum.

#### 8. Partisipasi lansia dalam bantuan sosial

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai dan Bahan Bakar Minyak. Dimana mereka yang merasa termasuk dalam keluarga miskin dan tidak memperoleh aliran dana tersebut melakukan aksi protes secara berkelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintahan desa yang dinilai lebih mementingkan ikatan-ikatan relasi untuk menentukan penerima dana. (Suyani, 2007, hal. 147).

#### **D. Tinjauan Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

##### **1. Pengertian Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah nama sebuah partai Islam di Indonesia. Sebelum mentransformasikan diri menjadi PKS, Partai Keadilan (PK) adalah nama partai yang dibentuk tahun 1998. Nama Partai Keadilan (PK) berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena tidak memenuhi *electroral threshold*. Partai Keadilan Sejahtera ini didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 9 Jumadil Awwal yang bertepatan dengan tanggal 20 April 2002. Partai ini beraskan Islam. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah Islam. Dikatakan partai dakwah karena pembentukan partai ini memang berangkat dari niat untuk melakukan tugas dakwah di bidang politik (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, 2009, hal. 25). Partai ini mengusung ciri yaitu sebagai partai yang bersih, peduli dan profesional. Kantor pusat partai ini berkedudukan di Jakarta. Sebagai partai yang didirikan di Indonesia, PKS memiliki visi menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun misi partai ini adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wata'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anggaran Dasar dan-Anggaran Rumah Tangga PKS, 2009, hal. 25)

Tujuan didirikannya Partai keadilan Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, adalah “Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Partai Keadilan Sejahtera menyadari pluralitas

etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang dilalui garis khatulistiwa di dalamnya. (Platform PKS, 2008, hal. iv)

Masyarakat Madani yang dimaksud adalah masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara (Suroto, 2015, hal. 671). Pengertian genuin dari Masyarakat Madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam *ukhuwah Islamiyyah* (ikatan keislaman), *ukhuwah wathaniyyah* (ikatan kebangsaan), dan *ukhuwah basyariyyah* (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sangat jelas posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam wacana bentuk Negara atau hubungan antara agama-negara. Bentuk negara dan hubungan agama-negara yang realistic obyektif untuk Indonesia dengan pluralitas dan keimanan penduduknya adalah Masyarakat Madani, Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Dalam negara dijamin kebebasan pemeluknya untuk beriman secara tauhid, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara subyektif Partai Keadilan Sejahtera memiliki *hajm ma'nawi* (kapasitas moral), *hajm fikri* (kapasitas idealita), *hajm ijtimai'i* (kapasitas social kemasyarakatan), *hajm ta'tsiri* (kekuatan pengaruh), *hajm siyasi* (kapasitas politik), sehingga dakwah mampu secara struktural memberikan pengaruh (melalui *public reason*). (Platform PKS, 2008, hal. 5)

Partai Keadilan Sejahtera pada awalnya adalah Partai Keadilan (PK), yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998. PK lahir dari momentum euphoria reformasi setelah lengsernya Soeharto tahun 1998. Basis Partai ini adalah gerakan Tarbiyah model Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tokoh utamanya adalah Hasan Al-Banna (Mawardi, 2013, hal. 10). Gerakan Tarbiyah ini menurut Norma Permata, seperti dikutip oleh Muslihudin, adalah gerakan yang mengadopsi konsep Islamisasi secara gradual (*gradual Islamisation*), yaitu berawal dari individu ke dalam keluarga, ke dalam masyarakat, dan kemudian ke dalam politik. (Muslihudin, 2013, hlm. 9)

Apabila melihat sejarah berdirinya PKS, kelahiran PKS dapat dibagi ke dalam tiga tahapan. Pertama fase dakwah kampus. Para aktivis umumnya usia muda yang bergerak dari dalam kampus (umumnya universitas umum) dan dalam skala terbatas di sekolah-sekolah dalam bentuk Rohani Islam (Rohis). Mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut adalah sama, yakni memberikan pemahaman dasar-dasar Islam dengan penekanan pada penanaman ghirah (semangat) keislaman. Kedua adalah pelembagaan gerakan mahasiswa. Pada perkembangannya, LDK semakin berkembang terutama di kampus-kampus umum, dan beberapa kampus Islam namun hanya sedikit. Masjid-masjid kampus menjadi pusat kegiatan dakwah, dan dihadiri banyak mahasiswa untuk ikut serta dalam lingkaran kecil kajian agama (halaqoh). Sehingga pada pertemuan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), beberapa aktivis LDK mengumumkan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI). Ketiga adalah gerakan politik. Gerakan politik ini dimotori oleh para aktivis KAMMI, alumni LIPIA, alumni Saudi Arabia dan alumni Timur Tengah lainnya. (Rokhmad, 2013, hlm. 11-12).

Melihat tahapan dakwah PKS di atas, tidak berlebihan bila saya sepakat dengan pendapat Muzakki bahwa strategi yang sangat populer di lingkungan PKS adalah dari Islamisasi Kampus ke Islamisasi Negara. (Muzakki, 2010, hlm. 65). Dari politik kampus ke politik Negara. Sebuah strategi yang sangat tersusun rapi. Konsolidasi internal dengan penguatan akidah dan akhlak para kader dakwah kampus. Pembinaan rutin tiap mingguan (liqo), sebagai amunisi menghadapi tantangan luar. Aktivitasaktivitas harian senantiasa dipelihara dan dipantau setiap minggunya oleh Sang Murobbi. Seperti sholat lima waktu harus dilakukan tepat waktu, tilawah al-quran minimal satu juz per hari, qiyamul lail, sholat dhuha, sedekah, silaturahmi, membaca buku Islami, membaca buku pengetahuan lain dan olahraga. Itu semua merupakan makanan ruhiyah, fikriyah dan jasadiyah. Seorang kader diharapkan memiliki fisik dan psikis yang kuat dan sehat sebagai modal dasar kekuatan tim. Karena tim yang kuat berasal dari individu-individu yang kuat pula.

Pengarus utamaan keluarga juga merupakan agenda besar PKS. Keluarga adalah basic utama membangun sebuah Negara. Negara akan rapuh jika keluarga-keluarganya pun rapuh. Peran ayah dan ibu sangat dituntut dalam membentuk jundi-jundiyah (putra-putri) mereka, sehingga menjadi generasi harapan bangsa. Tradisi membawa anak-anak ikut demonstrasi adalah bagian dari mengajarkan perjuangan semenjak dini. Bahwa semangat berjuang itu harus diajarkan sejak dini, sehingga diharapkan di kemudian hari, anak-anak tersebut menjadi generasi yang militan. Dalam setiap kegiatannya pun PKS selalu melibatkan anak-anak hingga dewasa. Anak-anak dibiasakan bersosialisasi dengan banyak orang, melihat situasi dunia sekitar yang amat sangat rumit. Sehingga kelak di kemudian hari generasi PKS menjadi generasi yang tangguh dalam menjawab tantangan global.

## **2. Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera**

Dalam kancah perpolitikan, setidaknya ada tujuh peranan yang PKS dermakan untuk Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan bentuk negara. Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang menjadi rahmat bagi semesta alam, PK Sejahtera bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah.

Kedua berkaitan dengan dinamika politik nasional, Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar Indonesia Baru ke depan berada pada kondisi politik yang sehat dan dinamis, dimana terjadi pematangan dari kondisi transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, yang ditandai dengan terbuka lebarnya ruang berekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial.

Ketiga, berkaitan dengan model demokrasi. Eksperimentasi politik di masa transisi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan

partisipasi politik dalam bentuk munculnya banyak partai politik, namun tetap dalam format sistem presidensial. Sejarah perpolitikan Tanah Air sejak era Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Lama, serta Demokrasi Presidensial di zaman Orde Baru, sampai hari ini di era Reformasi dengan praktek "Demokrasi Parlemen Multi Partai" memperlihatkan pergerakan bandul sejarah dari sistem liberal.

Keempat, berkaitan dengan sistem ketatanegaraan PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah seharusnya efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat.

Kelima, berkaitan dengan tata hubungan pemerintahan secara vertikal serta otonomi daerah, maka Partai Keadilan Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan peningkatan kapasitas.

Keenam, berkaitan dengan birokrasi, birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional merupakan cermin akan "tubuh" bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara.

Ketujuh, Partai Keadilan Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, "hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor". Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut (Platform PKS, 2008, hlm. 5-7).

Dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, bahwa Partai ini adalah salah satu Partai di Indonesia yang berasaskan Islam, walaupun semua organisasi politik atau organisasi masyarakat seyogyanya berasaskan Pancasila (Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga PKS, 2009, hlm. 2) Ini yang menjadi pertanyaan

beberapa peneliti. Menurut penelusuran saya, bahwa PKS ini memiliki kesamaan asas dan tujuan dengan salah satu organisasi gerakan jihad di Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin (IM) adalah salah satu organisasi gerakan perlawanan di Ismailia Mesir. Ikhwanul Muslimin (disingkat IM) didirikan pada bulan Maret 1928 oleh Hasan al-Banna dan 6 pekerja buruh. Gerakan ini menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar membangun masyarakat yang sehat. IM bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. IM banyak terlihat gerakannya dalam pemberdayaan masyarakat. Mereka membantu fakir miskin, memberantas buta huruf, membangun sekolah dan rumah sakit. Karena gerakan sosial inilah akhirnya IM menyebar ke seluruh penjuru Mesir.

Menurut Muhtadi, seperti dikutip Muslihudin, meskipun PKS muncul dengan wajah yang sangat politik (partai politik), tetapi etos dasarnya sebenarnya adalah organisasi kemasyarakatan (gerakan tarbiyah) yang bergerak di bidang dakwah Islam sesuai dengan induk semangnya yaitu LDK yang ada di kampus-kampus. Etos dasar PKS memiliki warna yang khas karena lebih dipengaruhi oleh doktrin Islamisme. Islamisme adalah sebuah doktrin yang menyakini bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atau aturan sosial. Bagi kaum Islamis, aturan politik sosial yang ada harus diganti dengan norma atau ajaran yang didasarkan kepada tafsir tertentu atas ajaran Islam (Muslihudin, 2013, hlm. 11) .

Sebagai partai yang lahir dari rahim gerakan tarbiyah, kaderkader PKS sudah terbiasa dalam mengkaji dan mendiskusikan teksteks keagamaan tradisional. Dalam perkembangannya, PKS juga mengembangkan perspektif tarbiyah yang lebih luas (Farish, 2007, hlm. 1), meliputi tarbiyyah nadzariyah (pendidikan norma dan teori Islam), tarbiyah ruhiyyah (pendidikan moral dan etika), tarbiyah maidaniyyah (pendidikan praktek mobilisasi masa dan organisasi), tarbiyah fikriyyah (kajian pemikiran kritis, termasuk logika dan teori kritis), tarbiyah harakiyyah (pendidikan pengembangan organisasi dan training terkait mobilisasi partai politik).

Terkait dengan bahasan teologi PKS ini, PKS tidak berbeda dengan Ikhwanul Muslimin, yang memiliki lima slogan organisasi yaitu: Allah adalah tujuan kami, Al-Quran adalah konstitusi kami, Rasulullah adalah pimpinan kami, jihad adalah jalan kami, dan syahid adalah cita-cita kami (Yakin, 2016, hlm. 226).

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. BAHARUDDIN. N, (2013) tentang “Optimalisasi Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada PEMILU Legislatif Berdasarkan Undang-Undang NO. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi di Kalimantan Barat)” hasilnya menunjukkan bahwa Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : Pertama; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu itu konsolidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg menjelang pemilu legislatif. Kedua; pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata.
2. GIBTHI IHDA SURYANI, (2007). Tentang “Partisipasi Lansia Dalam Kelembagaan Politik Desa (Kasus : Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor )”. Hasilnya menunjukkan bahwa Musyawarah di tingkat kampung dalam kegiatan pengajian merupakan kelembagaan penyaluran aspirasi yang mampu diakses oleh para Lansia dengan budaya ‘titip’ aspirasi yang masih kental diterapkan. Terutama bagi perempuan Lansia yang jarang dilibatkan dalam

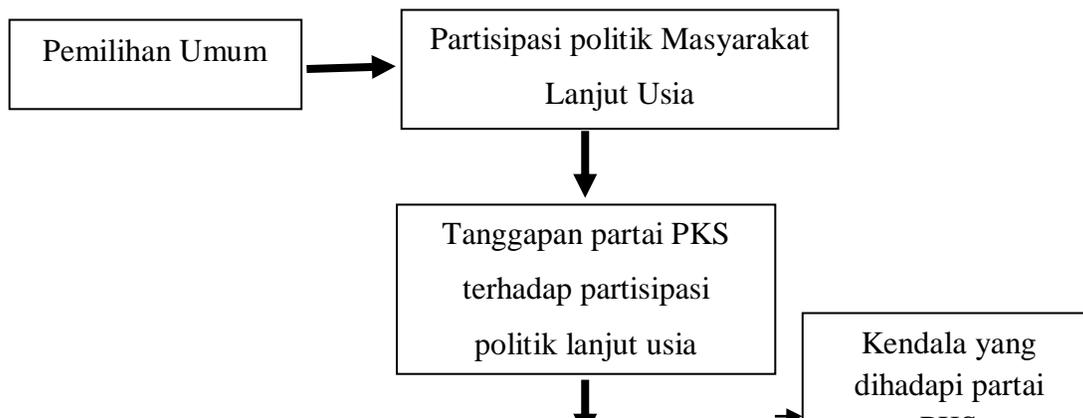
diskusi-diskusi maupun musyawarah politik desa. Hal ini menunjukkan meski memiliki akses namun 'mutu' partisipasi yang minimal karena kontrol yang hampir tertutup dalam fungsi pengambilan keputusan, menampilkan kesemuan dari keterlibatan dalam kelembagaan politik desa. Dimana Lansia tidak dapat berperan secara efektif dan penuh. Namun, ketika hal ini menyentuh kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, mendorong mereka untuk melakukan bentuk partisipasi yang lebih aktif untuk mempengaruhi kebijakan politik desa.

#### F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting ( Uma Sekaran dalam Sugiyono, 2017, hal: 60).

**Gambar 2.1**

Kerangka pemikiran



Sumber : diolah peneliti (2020)

Dalam meningkatkan partisipasi politik di masyarakat, bukan hanya tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja yang berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik di masyarakat, tetapi peran partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai partai politik sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Karena partai politik memiliki salah satu tugas dan fungsi yaitu untuk meningkatkan dan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Partisipasi politik menjadi aspek penting dalam sistem demokrasi, karena suara rakyatlah yang akan menentukan keputusan politik nantinya. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah (wakil rakyat) tentunya menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, oleh karena itu masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik yang harus di tingkatkan melalui peran partai politik yaitu lanjut usia. Walaupun lanjut usia memiliki banyak kekurangan fisik seperti penglihatan yang mulai buram, daya tangkap fikir yang mulai melemah, pendidikan yang rendah dan juga daya tahan tubuh yang mulai melemah membuat lanjut usia di kesampingkan bahkan sampai di acuhkan dalam partisipasi politik baik disaat pemilu untuk memberikan suara ataupun hanya memberikan saran.

Dalam hal ini partai politik harus mengetahui hambatan yang terjadi di masyarakat lanjut usia tentang partisipasi politik agar upaya partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik dan memberikan berupa pendidikan politik ataupun sosialisasi terhadap lanjut usia mendapatkan hasil yang dapat merubah lanjut usia menjadi lebih sadar dalam partisipasi politik dan ikut serta memberikan hak suaranya dalam politik